

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **II.1 KAJIAN PUSTAKA**

Untuk mencapai tujuan penelitian, kajian pustaka mempunyai fungsi membantu penentuan tujuan dan alat penelitian serta memilih konsep-konsep yang tepat. Jika dikatakan bahwa kajian pustaka merupakan variabel yang menentukan dalam suatu penelitian serta pemahaman yang komprehensif dari peneliti tentang pengetahuan yang pernah ditulis oleh orang lain dalam bidang yang menjadi konsep yang akan di teliti tentang analisis implementasi pengelolaan dana desa. Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan sebelumnya, dirasa sangat penting dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan baik itu dari landasan teori yang ada maupun dari penelitian sebelumnya yang akan dikaji dalam penelitian.

Penelitian John (2015) dengan judul Implementasi Kebijakan Anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Sidahari Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan anggaran Alokasi Dana Desa di Desa sidahari belum berjalan dengan semestinya serta belum sepenuhnya mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Keputusan Bupati Nomor 162 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Beberapa faktor yang menghambat ialah lemahnya komunikasi, sumber daya, sikap yang tidak jujur, dan tidak melakukan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan apa yang ditetapkan Pemerintah Daerah. pelaksanaan Pembangunan tidak berjalan dengan semestinya sehingga implementasi kebijakan tidak efektif dan tidak tepat sasaran.

Diansari (2015) melakukan penelitian dengan judul Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (Add) Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat pengelolaan program ADD diantaranya terbatasnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Lemahnya kinerja pengelolaan keuangan desa dan lemahnya pengawasan BPD dan

masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

Permana (2012) yang melakukan penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Mahe Seberang Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mahe Seberang Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong secara keseluruhan berjalan dengan baik hal ini ditunjukkan dengan terakomodirnya sebagian keperluan masyarakat di ADD, meningkatnya pembangunan infrastruktur dan terpenuhinya prasarana sosial kemasyarakatan. Akan tetapi pada implementasinya masih terdapat banyak kendala dalam memahami dan menjalankan isi kebijakan, kekeliruan dalam ketepatan alokasi sumber dana, keterlambatan dalam penyampaian laporan ke tim ADD tingkat selanjutnya dan kekurangan sumber daya aparatur yang terampil.

Penelitian yang dilakukan oleh Agriani (2015) dengan judul Implementasi Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kebumen dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan

Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan Perbup No. 8 Tahun 2014. Akan tetapi, dalam penggunaan ADD, Desa penerima besaran tertinggi di Kabupaten Kebumen mengalokasikan anggaran sebesar 70% untuk kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Desa penerima besaran terendah di Kabupaten Kebumen lebih memfokuskan penggunaan anggaran sebesar 70% untuk pembangunan fisik saja. Pertanggungjawaban dan pelaporan yang dilakukan oleh keenam Desa pun mengalami keterlambatan. Keterlambatan tersebut dipengaruhi juga oleh faktor kurangnya Sumber Daya Manusia di tingkat Desa.

Penelitian Wisakti (2008) dengan judul Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan. Dalam penelitiannya berfokus pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan , serta faktor-faktor penunjang dan penghambat yang mempengaruhi implementasi dan strategi yang harus dilakukan dalam rangka keberhasilan implementasi kebijakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan

Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan berjalan cukup lancar. Namun demikian apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan, pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan belum optimal. Meskipun tujuan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, telah terlaksana secara optimal, namun tujuan adanya peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan belum berjalan secara optimal. Demikian juga tujuan peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat belum optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan. Disini penulis menyimpulkan ada beberapa Faktor yang menjadi penunjang dari komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan adalah adanya sosialisasi, adanya kelancaran informasi

. adanya konsistensi kebijakan, kemampuan pelaksana, dukungan sarana dan prasarana, persepsi pelaksana yang baik, tim pelaksana, kewenangan BPD dan LPMD dan adanya kesesuaian pelaksanaan dengan kebijakan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya adalah : Belum adanya sosialisasi ADD kepada masyarakat, rendahnya SDM, kurangnya dukungan pendapatan desa lain, kurangnya respon pelaksana, tidak adanya pembagian tugas tim, kurang berjalannya peran LPMD dan ketidaktepatan sasaran.

Suparman (2014) yang melakukan penelitian tentang Implementasi Program Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses implementasi program ADD di Kecamatan Sukadana belum sepenuhnya mengarah pada pengembangan sosial ekonomi masyarakat Desa. Anggaran Dana Desa tersebut lebih diprioritaskan pada pembangunan fisik saja sedangkan pembangunan non fisik tidak terlalu banyak dianggarkan padahal kedua aspek tersebut seharusnya diprioritaskan secara berimbang sehingga tidak ada ketimpangan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program ADD dalam pemberdayaan masyarakat desa diantaranya: faktor Sumber Daya Manusia (SDM); sosialisasi dan penyaluran dana; serta koordinasi yang masih belum sesuai dengan harapan yang diinginkan sehingga menyebabkan proses implementasi program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara tidak berjalan dengan optimal.

Penelitian yang dilakukan Syamsi (2014) dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. Hasil penelitiannya menunjukkan (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam pengelolaan anggaran dana desa. (2) Pengelolaan anggaran dana desa di Desa akan dalam pembelanjannya terbagi menjadi tiga bagian yaitu; ADDr, ADDp dan ADDk. Namun dalam pengelolaan tersebut masih kurang baik dikarenakan keputusan yang kurang bijaksana, tidak ada transparansi anggaran dan kurangnya pertanggungjawaban atas pembelanjaan anggaran dana desa itu sendiri. (3) Hambatan partisipasi masyarakat Dalam pengelolaan anggaran dana desa

masih lemah baik dari segi pikiran, tenaga, keahlian dan waktu. Hal itu disebabkan oleh keputusan yang tidak bijaksana, komunikasi yang tidak intraktif, kurangnya kesadaran masyarakat, and pendidikan yang rendah.

Penelitian yang dilakukan Nur, Bulkis, & Naping (2011) dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Desa Studi Kasus : Program Alokasi Dana Desa di Desa Bialo Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat pada tahap persiapan berupa kehadiran dan sumbangan ide atau pemikiran, pada tahap pelaksanaan bentuk partisipasi masyarakat berupa tenaga, dana dan material, pada tahap pemeliharaan bentuk partisipasi masyarakat berupa tenaga. Kedua, aspek-aspek yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat yaitu jumlah keluarga sejahtera, jenis pekerjaan. Sementara tingkat pendidikan hanya berpengaruh pada tahap perencanaan, sementara homogenitas masyarakat desa tidak memiliki hubungan yang erat dengan partisipasi masyarakat.



Penelitian Supriyadi (2016) dengan judul Pengaruh Implementasi Program Dana Pembangunan Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Pangkoh Sari Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau. Dalam penelitiannya ditemukan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Pangkoh Sari Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau masih rendah disebabkan oleh implementasi Program Dana Pembangunan Desa/Kelurahan tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan. Hasil perhitungan dan analisis menunjukkan bahwa Implementasi program dana pembangunan desa/kelurahan berpengaruh kuat dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Pangkoh Sari Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

Penelitian Mamelu, Kalangi dan Lambey (2016) dengan judul Analisis Pelaksanaan Dan Penatausahaan Dana Desa Pada Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Analisis Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa di Desa-desa

dalam Wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur Pelaksanaan Dana Desa dilakukan berdasarkan regulasi. Namun belum semua pekerjaan dilakukan dengan tertib administrasi. Pelaksanaannya belum sepenuhnya mendukung asas-asas pengelolaan keuangan desa. Selain itu Pemerintah Desa belum memiliki SOP (standard operating procedure) terkait pelaksanaan dana desa. Ini dibutuhkan guna mendukung implementasi program dana desa.

Raharjo (2013) yang meneliti tentang Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 Di Desa Jembul Dan Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam kegiatan belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa di Desa Jembul dan Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo belum dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Faktor usia dan Faktor SDM mempengaruhi kinerja dari Aparatur Pemerintah Desa Sedangkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Jembul belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena alokasi dana desa yang terlalu kecil. Kepala Desa

memprioritaskan penggunaan alokasi dana desa pada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang lebih urgent dan memiliki dampak positif yang tampak pada masyarakat.

Penelitian yang di lakukan oleh Sitorus (2016) dengan judul Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kampung Lingsang Mapan Kecamatan Lingsang Bigung Kabupaten Kutai Barat hasil dari penelitan tersebut menunjukkan bahwa mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kampung Lingsang Mapan Kecamatan Lingsang Bigung Kabupaten Kutai Barat. Serta untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kampung Lingsang Mapan Kecamatan Lingsang Bigung Kabupaten Kutai Barat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan ADD di kampung Lingsang Mapan belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat terlihat dari kurangnya pemahaman tim pengelola ADD dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana ADD, karena dalam proses perencanaan hanya dilakukan olen

Tim pengelola ADK tanpa melibatkan seluruh masyarakat kampung ikut berpartisipasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Muralidhar and V Srihari (2015) dengan judul pendekatan strategis untuk Implementasi desa Cerdas di India. Hasil penelitian tersebut ialah terfokus pada Pembangunan desa pintar dapat dicapai untuk desa yang ada melalui pelaksanaan strategi mengendalikan faktor dari awal. Sebuah desa bisa menjadi 'pintar' menggunakan ini kerangka dengan mengamati tantangan dan masalah yang mungkin datang selama proses dan teknokrat dapat merancang kerangka hukum yang dapat membuat hal-hal yang bergerak lebih mudah dan lebih cepat., berbagai akademisi, sosiolog, pengembang, birokrat dan politisi bisa merencanakan program kesadaran yang berbeda bagi warga desa untuk memiliki pemahaman yang tepat tentang bagaimana mereka mendapatkan manfaatnya. Konsep desa pintar dalam literatur yang dapat memberikan berbagai pilihan suntik kecerdasan dalam kehidupan desa. Sebuah komposisi pengetahuan dan pandai dan adopsi mendukung mereka untuk kehidupan desa gaya jangka panjang yang berkelanjutan

perspektif lebih sensitif untuk pembentukan cerdas desa berpengetahuan.

*(The research was done by P Muralidhar and V Srihari (2015) title Strategic approaches for Smart Village Implementation in India The study results are focused smart village development can be accomplished to an existing village through strategic implementation of controlling factors from scratch. A village can become 'smart' using this framework by observing the challenges and issues that may come during the process and technocrats can design a legal framework which can make things move easier and faster., various academicians' , sociologist's, developers, bureaucrats and politicians can plan different awareness programs for the villagers to have a proper understanding on how they get benefitted. The concepts of smart village in the literature which can be provide various options of injecting smartness in village life. A composition of knowledge and smartness and their supportive adoption to the village life style from a long term sustainable perspective is more sensitive for establishment of smart knowledgeable village)*

Penelitian yang dilakukan Farida (2016) yang berjudul Analisis Pelaksanaan Program Dana Desa Dalam Mendukung Pendapatan Daerah. Hasil penelitian tersebut ialah Implementasi adalah pelaksanaan serangkaian dari kegiatan dalam rangka memberikan kebijakan publik tersebut dapat membawa hasil yang diharapkan termasuk serangkaian kegiatan. Ada empat hal yang mempengaruhi pelaksanaan proses dalam program ini

meliputi komunikasi, sumber daya manusia, sikap eksekutif, struktur birokrasi. Implementasi diarahkan untuk kegiatan, tindakan, atau mekanisme pelaksanaan tidak hanya aktivitas tetapi aktivitas dan untuk mencapai tujuan yang direncanakan kegiatan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan Dana Desa adalah bagaimana upaya dari Panitia dari program Dana Desa untuk meningkatkan pembangunan masyarakat dan masyarakat aspirasi menambah fasilitas dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam program desa.

*(Research Ida Farida (2016) The journal, titled Analysis Of Implementation Program Village Funds in Supporting Regional Revenue hearts Implementation is the implementation of a series from activities in order to provide public policy so that the policy can bring the expected results included a series of activities . There are four things that affect of the process implementation in the program include communications , human resources , executive attitudes , bureaucratic structure . Implementation is directed to activities , actions , or implementation mechanisms not only activity but the activity and to achieve the objectives of the planned activities . Some things to consider in the implementation of the Village Fund is how the efforts of the organizing committee of the Village Fund program to increase community development and community aspirations add facilities in order to increase the role of the community in the village program.)*

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu Tentang Analisis Implementasi Dana Desa**

Nama penulis	Judul	Temuan
Adrianus Devaczy John P Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 4 Nomor 1 (2015)	Implementasi Kebijakan Anggaran Alokasi Dana Desadi Desa Sidahari Kecamatan Jelai Hulukabupaten Ketapang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan anggaran Alokasi Dana Desa di Desa sidahari belum berjalan dengan semestinya serta belum sepenuhnya mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Keputusan Bupati Nomor 162 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Lemahnya komunikasi, sumber daya, sikap yang tidak jujur, dan tidak melakukan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan apa yang ditetapkan Pemerintah Daerah. pelaksanaan Pembangunan tidak berjalan dengan semestinya sehingga implementasi kebijakan tidak efektif dan tidak tepat sasaran.
Rani Eka Diansari Seminar Nasional Universitas	Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (Add) Kasus Seluruh Desa Di	Rani Eka Diansari (2015) melakukan penelitian dengan judul Hasil penelitian ini

<p>PGRI Yogyakarta 2015</p>	<p>Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013</p>	<p>menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat pengelolaan program ADD diantaranya terbatasnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Lemahnya kinerja pengelolaan keuangan desa dan lemahnya pengawasan BPD dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.</p>
<p>Gt. Judid Ihsan Permana (2012) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume I Edisi 2, Juli- Desember 2012</p>	<p>Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Mahe Seberang Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mahe Seberang Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong secara keseluruhan berjalan dengan baik hal ini ditunjukkan dengan terakomodirnya sebagian keperluan masyarakat di ADD, meningkatnya pembangunan infrastruktur dan terpenuhinya prasarana sosial kemasyarakatan. Akan tetapi pada</p>



		<p>implementasinya masih terdapat banyak kendala dalam memahami dan menjalankan isi kebijakan, kekeliruan dalam ketepatan alokasi sumber dana, keterlambatan dalam penyampaian laporan ke tim ADD tingkat selanjutnya dan kekurangan sumber daya aparatur yang terampil.</p>
<p>Nurul Lintang Agriani Journal of Politic and Government Studies Vol 5, No 4 (2015)</p>	<p>Implementasi Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kebumen</p>	<p>hasil pelelitian yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan Perbup No. 8 Tahun 2014. Akan tetapi, dalam penggunaan ADD, Desa penerima besaran tertinggi di Kabupaten Kebumen mengalokasikan anggaran sebesar 70% untuk kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Desa penerima besaran terendah di Kabupaten Kebumen lebih memfokuskan penggunaan anggaran sebesar 70% untuk pembangunan fisik saja. Pertanggungjawaban dan pelaporan yang dilakukan oleh keenam Desa pun mengalami keterlambatan.</p>

		Keterlambatan tersebut dipengaruhi juga oleh faktor kurangnya Sumber Daya Manusia di tingkat Desa.
Daru Wisakti (2008). Tesis Magister Ilmu Administrasi Universitas Diponegoro Semarang	Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan berjalan cukup lancar. Namun demikian apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan, pelaksanaan masih belum optimal. Meskipun tujuan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, telah terlaksana secara optimal, namun tujuan adanya peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan belum berjalan secara optimal. Demikian juga tujuan peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat belum optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana

		<p>Desa adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan adalah : adanya sosialisasi, kelancaran informasi, konsistensi kebijakan, kemampuan pelaksana, dukungan sarana dan prasarana, persepsi pelaksana yang baik, tim pelaksana, kewenangan BPD dan LPMD dan adanya kesesuaian pelaksanaan dengan kebijakan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya adalah : Belum adanya sosialisasi ADD kepada masyarakat, rendahnya SDM, kurangnya dukungan pendapatan desa lain, kurangnya respon pelaksana, tidak adanya pembagian tugas tim, kurang berjalannya peran LPMD dan ketidaktepatan sasaran.</p>
<p>Suparman (2014) Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2014</p>	<p>Implementasi Program Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses implementasi program ADD di Kecamatan Sukadana belum sepenuhnya mengarah pada pengembangan sosial</p>

		<p>ekonomi masyarakat Desa. Karena ADD tersebut lebih diprioritaskan pada pembangunan fisik saja sedangkan pembangunan non fisik tidak terlalu banyak dianggarkan padahal kedua aspek tersebut seharusnya diprioritaskan secara berimbang sehingga tidak ada ketimpangan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program ADD dalam pemberdayaan masyarakat desa diantaranya: faktor Sumber Daya Manusia (SDM); sosialisasi dan penyaluran dana; serta koordinasi yang masih belum sesuai dengan harapan yang diinginkan sehingga menyebabkan proses implementasi program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara tidak berjalan dengan optimal.</p>
<p>Syahrul Syamsi (2014) Jurnal Ilmu Sosial dan</p>	<p>Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol</p>	<p>Hasil penelitiannya menunjukkan (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam</p>

<p>Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi</p>	<p>Penggunaan Anggaran Dana Desa.</p>	<p>pengelolaan anggaran dana desa. (2) Pengelolaan anggaran dana desa di Desa akan dalam pembelanjannya terbagi menjadi tiga bagian yaitu; ADDr, ADDp dan ADDk. Namun dalam pengelolaan tersebut masih kurang baik dikarenakan keputusan yang kurang bijaksana, tidak ada transparansi anggaran dan kurangnya pertanggungjawaban atas pembelanjaan anggaran dana desa itu sendiri. (3) Hambatan partisipasi masyarakat Dalam pengelolaan anggaran dana desa masih lemah baik dari segi pikiran, tenaga, keahlian dan waktu. Hal itu disebabkan oleh keputusan yang tidak bijaksana, komunikasi yang tidak intraktif, kurangnya kesadaran masyarakat, and pendidikan yang rendah.</p>
<p>Faisal Nur, Sitti Bulkis dan Hamka Naping (2011). Jurnal Program Pasca Sarjana Unhas</p>	<p>Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Desa Studi Kasus : Program Alokasi Dana Desa di</p>	<p>penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat pada tahap persiapan berupa kehadiran dan sumbangan ide atau pemikiran, pada tahap pelaksanaan bentuk partisipasi masyarakat</p>

	Desa Bialo Kabupaten Bulukumba.	berupa tenaga, dana dan material, pada tahap pemeliharaan bentuk partisipasi masyarakat berupa tenaga. Kedua, aspek-aspek yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat yaitu jumlah keluarga sejahtera, jenis pekerjaan. Sementara tingkat pendidikan hanya berpengaruh pada tahap perencanaan, sementara homogenitas masyarakat desa tidak memiliki hubungan yang erat dengan partisipasi masyarakat.
Supriyadi (2016) Jurnal Manajemen Dan Akuntansi (STIE) Kuala Kapuas	Pengaruh Implementasi Program Dana Pembangunan Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Pangkoh Sari Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.	Hasil penelitiannya Ditemukan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Pangkoh Sari Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau masih rendah disebabkan oleh implementasi Program Dana Pembangunan Desa/Kelurahan tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan. Hasil perhitungan dan analisis menunjukkan bahwa Implementasi program dana pembangunan

		desa/kelurahan berpengaruh kuat dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Pangkoh Sari Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.
Ayu Ningsi , Slamet Martha Ogotan, Very. Y. Londa (2017) Jurnal Administrasi Publik UNSRAT	Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Suatu Studi di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa)	berdasarkan hasil penelitian melalui pengamatan, pengumpulan data dan proses wawancara yang peneliti lakukan mengenai Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa dapat menyimpulkan pada indikator isi kebijakan (konten kebijakan), bahwa ADD memang benar – benar untuk masyarakat, walaupun masih banyak masyarakat yang mempunyai perbedaan persepsi dengan perangkat desa karna kurangnya sosialisasi dari perangkat desa soal ADD di Desa Kalasey Dua, manfaatnya langsung dirasakan juga oleh masyarakat Desa Kalasey Dua, dan kemudian pelaksana kebijakan ADD ini berjalan cukup maksimal

		<p>dari Kepala Desa sampai pada perangkat desa yang berhubungan langsung dengan penerapan alokasi dana desa tersebut. Sedangkan, pada Konteks Kebijakan ADD di Desa Kalasey Dua, para aparat desa sudah menjalankan atau menerapkan ADD sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Desa Kalasey Dua, selain itu tugas pokok dan fungsi masing – masing dari aparat desa walaupun terlihat belum terlalu baik secara kordinasi tapi sampai saat ini sudah cukup baik secara komunikasi, baik dari Kepala desa, Sekertaris desa, Bendahara Desa, BPD, dan LPM.</p>
<p>Gresly Yunius Rainal Mamelu, Lintje Kalangi dan Linda Lambey (2016). Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill", 7(2).</p>	<p>Analisis Pelaksanaan Dan Penatausahaan Dana Desa Pada Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu</p>	<p>hasil dari penelitan tersebut menunjukan bahwa Analisis Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa di Desa-desa dalam Wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur Pelaksanaan Dana Desa dilakukan berdasarkan regulasi. Namun belum semua pekerjaan dilakukan dengan tertib administrasi.</p>



		<p>Pelaksanaannya belum sepenuhnya mendukung asas-asas pengelolaan keuangan desa. Selain itu Pemerintah Desa belum memiliki SOP (standard operating procedure) terkait pelaksanaan dana desa. Ini dibutuhkan guna mendukung implementasi program dana desa.</p>
<p>Raharjo (2013) Jurnal Wacana–Vol. 16, No. 1 (2013)</p>	<p>Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 Di Desa Jembul Dan Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto</p>	<p>Implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam kegiatan belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa di Desa Jembul dan Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo belum dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Faktor usia dan Faktor SDM mempengaruhi kinerja dari Aparatur Pemerintah Desa Sedangkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Jembul belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena alokasi dana desa yang terlalu kecil. Kepala Desa memprioritaskan penggunaan alokasi dana desa pada kegiatan pemberdayaan masyarakat</p>

		yang lebih urgent dan memiliki dampak positif yang tampak pada masyarakat.
Nova Sintia Dewi Sitorus, dkk (2016) Jurnal Administrative Reform, Vol.4 No.1 , Januari - Maret 2016	Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kampung Linggang Mapan Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat	Mendesripsikan dan menganalisis Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kampung Linggang Mapan Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat. Serta untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kampung Linggang Mapan Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan ADD di kampung Linggang Mapan belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat terlihat dari kurangnya pemahaman tim pengelola ADD dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana ADD, karena dalam proses perencanaan hanya dilakukan oleh Tim pengelola ADK tanpa melibatkan seluruh

		masyarakat kampung ikut berpartisipasi
Ida Farida (2016). In <i>International Conference On Law, Business And Governance (Icon-LBG) (P. 1)</i> .	<i>Analysis Of Implementation Program Village Funds In Supporting Regional Revenue</i>	<i>Implementation is the implementation of a series from activities in order to provide public policy so that the policy can bring the expected results included a series of activities . There are four things that affect of the process implementation in the program include communications , human resources , executive attitudes , bureaucratic structure . Implementation is directed to activities , actions , or implementation mechanisms not only activity but the activity and to achieve the objectives of the planned activities . Some things to consider in the implementation of the Village Fund is how the efforts of the organizing committee of the Village Fund program to increase community development and community aspirations add facilities in order to increase the role of the community in the village program.</i>
P Muralidhar	<i>Strategic</i>	<i>results are focused smart</i>

<p>and V Srihari (2015). <i>Institute of Construction Management and Research- Construction National Industry Staff College</i></p>	<p><i>approaches for Smart Village Implementation in India</i></p>	<p><i>village development can be accomplished to an existing village through strategic implementation of controlling factors from scratch. A village can become 'smart' using this framework by observing the challenges and issues that may come during the process and technocrats can design a legal framework which can make things move easier and faster., various academicians', sociologist's, developers, bureaucrats and politicians can plan different awareness programs for the villagers to have a proper understanding on how they get benefitted. The concepts of smart village in the literature which can be provide various options of injecting smartness in village life. A composition of knowledge and smartness and their supportive adoption to the village life style from a long term sustainable perspective is more sensitive for establishment of smart knowledgeable village</i></p>
---	--	---

Penelitian yang dilakukan saat ini untuk melengkapi beberapa penelitian dan kajian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu seperti yang telah dijelaskan diatas, namun penelitian yang di lakukan peneliti akan lebih fokus dalam menganalisis implementasi penggunaan dana desa sesuai teori implementasi dan PERMENDES No 21 Tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana desa di Desa Amin Jaya, Desa Sungai Pakit Dan Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat. Alasan peneliti memilih lokasi di tiga (3) tersebut peneliti tertarik pada letak geografis dan sejarah desa dimana desa Amin Jaya adalah desa yang terletak pada perbatasan antara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kabupaten Seruyan, sedangkan desa Sungai Pakit adalah desa yang baru saja memisahkan diri (pemekaran) dari desa Amin Jaya. Serta desa yang terakhir desa Karang Mulya adalah desa yang terletak di jantung kecamatan Pangkalan Banteng maka dari itu peneliti akan membandingkan *out put* dan *out come* tentang pengelolaan dana desa tersebut apakah sesuai dengan prioritas dan tujuan dana desa . Selain itu masih banyak permasalahan

mendasar tentang implementasi dana desa seperti sumberdaya manusia yang masih kurang memadai serta keikutsertaan masyarakat dalam implementasi dana desa masih rendah.

## **II.2 Kerangka Teori**

### **II.2.1 Konsep Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan pada dasarnya ialah cara pencapaian suatu kebijakan dalam mengimplementasi kebijakan publik ada dua pilihan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Bicara tentang konsep implementasi kebijakan banyak ilmuwan yang mengemukakan salah satunya pelaksanaan kebijakan yang di kemukaan Winarno (2014:177) studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika kebijakan tidak mengurangi masalah maka kebijakan tersebut mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan tersebut di

implementasikan dengan baik. Sementara itu kebijakan yang sangat baik tapi tidak di implementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Metter dan Horn (1975: 6) juga mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan.

Senada dengan Grindle, (1980) Implementasi kebijakan, sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut-paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari pada itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Mengenai hal ini Wahab (2002:59) menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari

keseluruhan proses kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Dari penjelasan dari para ahli diatas bahwa implementasi kebijakan tidak akan di laksanakan bila sebelum tujuan-tujuan dan sasaran di tetapkan dan diidentifikasi oleh keputusan kebijakan. Proses kegiatan implementasi dapat dilakukan beberapa aktor sehingga mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan.

## **II.2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi**

Dilihat dari implementasi kebijakan yang masih selalu mengalami kegagalan baik di kebijakan maupun di pelaksanaan kebijakan maka beberapa ilmuan mengemukakan teorinya sebagai acuan dalam implementasi kebijakan.

Menurut Hogwood dan Gunn dalam Wahab (1997 : 71-81), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain:

- 1) kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana;



- 2) tersedia waktu dan sumber daya;
- 3) keterpaduan sumber daya yang diperlukan;
- 4) implementasi didasarkan pada hubungan kaulitas yang handal;
- 5) hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung;
- 6) hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan;
- 7) kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan;
- 8) tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis;
- 9) komunikasi dan koordinasi yang baik;
- 10) pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.

Menurut Grindle dalam Wibawa (1994) implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan berkaian dengan kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Sementara konteks implementasi berkaitan

dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasaan dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

Edward III dalam Winarno (2014) implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik antara pembentukan kebijakan yang di pengaruhinya. Dalam mengkaji implementasi Edwards mengemukakan ada 4 (empat) variabel yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan meliputi komunikasi, sumber-sumber,(sumberdaya manusia dan sumber dana), disposisi (sikap) dan struktur birokrasi.

#### 1) Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada yang di komunikasikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Edwards dalam Winarno (2014:178) komunikasi merupakan keterampilan manajemen yang sering digunakan dan sering disebut sebagai satu kemampuan yang sangat bertanggung jawab bagi keberhasilan seseorang, ia sangat penting sehingga orang-orang sepenuhnya tahu bagaimana mereka berkomunikasi. Edwards dalam Winarno (2014:179) membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan.

1. Faktor utama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Ada beberapa hambatan yang timbul dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi. Pertama pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Kedua, informasi melewati berlapis-lapis hirarki birokrasi.
2. Faktor kedua yang mempengaruhi komunikasi adalah

kejelasan. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya harus diterima para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal.

3. Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

Bila dikaitkan faktor-faktor yang dikemukakan oleh Edwards dengan analisis implementasi pengelolaan dana desa

maka peneliti menggunakan untuk mengukur komunikasi ialah

- a. Intensitas sosialisasi kepada pelaksana dan masyarakat tentang implementasi dana desa
  - b. Kejelasan tujuan implementasi dana desa
  - c. Kosisten terhadap keberlanjutan program implementasi kebijakan dana desa.
- 2) Sumber –sumber

Sumber –sumber dapat merupakan faktor yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan maka implementasipun cenderung tidak efektif.

- a) Sumber daya manusia

Menurut Winarno (2002:138) juga menyebutkan bahwa sumber-sumber yang akan mendukung kebijakan yang efektif terdiri dari jumlah staf yang mempunyai ketrampilan yang memadai serta jumlah yang cukup, kewenangan, informasi dan fasilitas-fasilitas yang di perlukan guna intuk melaksanakan pelayan publik.

b) Sumber Dana

PP No. 60 Tahun 2014 disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten / kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

c) Sumberdaya Kewenangann

Sumberdaya yang penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa:

Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga dan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka di hadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera di selesaikan dengan suatu keputusan.

Oleh karena itu, Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk

melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

Bila menurut para ahli dan Peraturan Pemerintah di atas jika berkaitan dengan penelitian tentang analisis implementasi dana desa maka faktor yang mendukung ialah.

1. Sumberdaya manusia yang memadai dalam implementasi dana desa maka perlunya adanya sosialisasi dan pelatihan penggunaan dan pengelolaan dana desa.
  2. Laporan anggaran program dan pelaksanaan program
  3. Sumber dana yang jelas dan penggunaannya tepat sasaran
  4. Kewenangan pemerintah desa dalam mengimplementasikan dana desa
- 3) Disposisi

Menurut Edward III dalam Wianrno (2005:142) mengemukakan "kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif". Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana

sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius. Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kamaan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- a. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-



orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

- b. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu memungkinkan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

#### 4) Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan. Menurut

Edward dalam Winarno (2014:205) Ripley dan Franklin, berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi.

- a. Birokrasi dimanapun berbeda, dipilih sebagai instrumen sosial untuk menangani masalah yang di identifikasikan sebagai urusan publik
- b. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam pelaksanaan kebijakan, yang kepentinganya berbeda-beda masing-masing tahap.
- c. Birokrasi mempunyai tujuan yang berbeda
- d. Birokrasi berbeda dengan lingkungan yang luas dan kompleks
- e. Birokrasi jarang mati, untuk bertahan hidup tak perlu dipertanyakan lagi.
- f. Birokrasi merupakan suatu yang netral dalam pilihan-pilihan kebijakan serta tidak secara penuh di kontrol oleh luar pada dirinya.

Menurut Edwards dalam Winarno (2014), ada dua karakteristik birokrasi yaitu prosedur-prosedur kerja ukuran-

ukuran dasar atau sering di sebut *Standart Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi.

1) *Standart Operating Procedures* (SOP)

Salah satu aspek dalam organisasi yang paling dasar adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya (*Standart Operating Procedures*, SOP) dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu SOP, juga bisa menyeragamkan pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas.

2) Fragmentasi

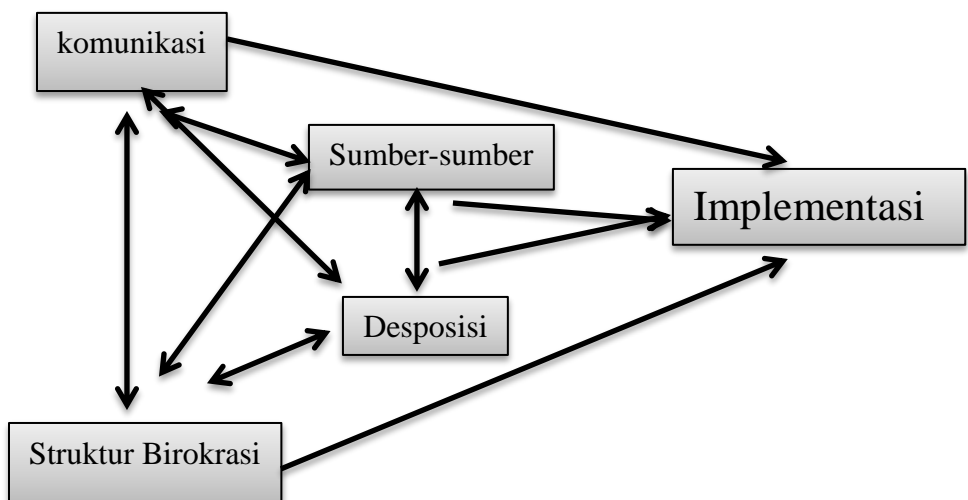
Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi birokrasi. Tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar diantara beberapa organisasi, seringkali juga terjadi desentralisasi kekuasaan tersebut di lakukan secara radikal guna mencapai tujuan kebijakan.

Berkaitan dengan penelitian ini, maka fenomena yang dipergunakan untuk mengukur struktur birokrasi adalah :

- 1) Pembentukan Struktur Organisasi
- 2) Koordinasi dari para pelaksana kebijakan.
- 3) Penyebaran tanggung jawab implementasi dana desa
- 4) Mempunyai *Standart Operating Procedures (SOP)* dalam mengimplementasikan dana desa

Penjelasan singkat dari beberapa hubungan dari variabel diatas akan berpengaruh secara langsung pada pelaksanaan kebijakan, dimana komunikasi mempengaruhi sumber-sumber, disposisi dan struktur bisokrasi yang pada gilirannya akan mempengaruhi implementasi.

**Bagan 1. Dampak langsung dan tidak langsung pada implementasi**



Sumber : George C. Edwards (dalam Winarno 2014 : 221)

### **II.2.3 Pemerintah Desa**

Pemerintah desa sebagai badan terendah pemerintahan pada tugas pekerjaan atau fungsi yang sejalan pada kehidupan masyarakat atau yang di perintah. Peran pemerintah desa yang di bentuk untuk menggerakkan masyarakat agar bisa menjadi kekuatan penting dalam pembangunan. Dengan adanya dana desa, kesempatan desa untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sangat terbuka. Untuk melihat pencapaian program maka implementasi penggunaan dana desa harus di perhatikan.

Menurut Ndraha (1997) desa dianggap sebagai sumber nilai leluhur yang memiliki karakteristik seperti gotong royongan, musyawarah muakat, dan kekeluargaan, sehingga menimbulkan berbagai semboyan. Menurut Mutty (1990), desa adalah suatu lembaga pemerintahan dengan hak otonomi yang di miliknya telah mendapat pengakuan jauh sebelum di laksanakanya pemerintahan dengan asas desentralisasi.

Pemerintahan Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya “Otonomi Desa” Pemerintahan Desa diartikan sebagai :

“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati” (Widjaja, 2003: 3).

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Amnulloh (2015:36) “musyawarah desa merupakan forum tertinggi di desa yang berfungsi untuk mengambil keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

#### **II.2.4 Keuangan Publik**

Dalam pasal 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2004, tentang Keuangan Negara menjelaskan, bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Proses penyelenggaraan pemerintah ditujukan untuk mengkoordinasi pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam suatu sistem pengelolaan keuangan publik. ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan dan lain sebagainya pada sektor keuangan dan administrasi keuangan.

Pengelolaan keuangan daerah semuanya dapat dipahami dari pemahaman tentang anggaran daerah. Salah satu indikator keberhasilan keuangan otonomi daerah adalah bagaimana pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mampu menggunakan dan memafaatkan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif dan efisien melalui sumber-sumber daya publik dalam membiayai aktivitas pembangunan yang dilakukan (Waluyo, 2007:205). Sehingga dengan adanya pengelolaan sumber keuangan daerah yang efektif dan efisien maka program-program dalam pelaksanaan otonomi daerah akan semakin mencapai suatu keberhasilan, dan pengelolaan daerah tersebut

dikenal dengan manajemen keuangan daerah.

Anggaran daerah merupakan bagian dari manajemen keuangan daerah yang secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Sesuai dengan Mardiasmo (2010:9) bahwa anggaran daerah atau (APBD) adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun). Semua bentuk organisasi, sektor swasta maupun sektor publik pasti akan melakukan penganggaran yang pada dasarnya merupakan cara untuk mencapai visi dan misinya (Mardiasmo, 2002:106). Untuk itu manajemen keuangan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi sebagai cara untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah. Seperti yang telah dijelaskan Mardiasmo (2002:105-106), prinsip manajemen keuangan daerah meliputi akuntabilitas, value for money, transparansi, pengendalian, dan kejujuran.

#### **II.2.5 Dana Desa**

Dana desa merupakan bentuk nyata dari pengakuan Negara terhadap hak-hak desa dalam membangun dan



memberdayakan masyarakatnya berskala desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayayai penyeenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa yang merupakan mandat dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Setiap tahun desa akan mendapatkan dana desa dari pemerintah pusat yang di alokasikan dalam bentuk trasfer ke atau pemindah-bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan di salurkan kepada desa melalui tranfer ke rekening kas desa (RKD).

Pelaksanaan kegiatan dana desa yang lebih di prioritaskan secara terperinci atau berupa usulan kegiatan menjadi kewenangan masyarakat Desa dalam mengambil keputusan melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Jadi prioritas usulan adalah berasal dari masyarakat Desa, dan dibahas serta

diputuskan oleh masyarakat Desa sendiri, sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan, potensi dan aset yang dimiliki Desa sendiri dan sumber keuangan Desa setiap tahun.

Dalam pelaksanaannya pemerintah desa melaksana mandat masyarakat dari hasil Musdes dan Musrenbangdes berupa RPJM Desa, dan RKP Desa yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen APB Desa sebagai dokumen pelaksanaan anggaran di Desa.

Prioritas dana desa diatur melalui Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik indonesia. Implementasi penggunaan dana desa tertera pada PERMENDES No.21 Tahun 2016 Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- 1) Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
- 2) Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan

- 3) Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas,
- 4) Serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

### **Bagan 2. Prioritas Penggunaan Dana Desa**

<b>Prioritas Penggunaan Dana Desa</b>	
<b>Pembangunan desa</b>	<b>Pemberdayaan masyarakat</b>
Pemenuhan kebutuhan dasar	Peningkatan kualitas proses perencanaan desa
Pengembangan potensi ekonomi lokal	Mendukung kegiatan ekonomi BUMdes atau masyarakat
Pengembangan sarana dan prasarana desa	Pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan
Pemanfaatan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan	Pengorganisasian bantuan hukum kepada masyarakat
	Penyelenggaraan promosi kesehatan
	Dukungan terhadap kegiatan desa
	Meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat

Sumber : Permendes No 5/2016 Bab II, Bab III, Bab IV

Prioritas dalam implementasi penggunaan dana desa ada dua yang di prioritaskan yaitu pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

## 1. Pembangunan desa

Pembangunan desa yang di programkan dan disepakati serta di putuskan melalui musyawarah desa yang akan menjadi acuan untuk membuat Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPD) dan APBDes.

- a) Pemenuhan kebutuhan dasar
- b) Pengembangan potensi ekonomi lokal
- c) Pengembangan sarana dan prasarana desa
- d) Pemanfaatan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan

## 2. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat mempunyai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan program.

- a) Peningkatan kualitas proses perencanaan desa
- b) Mendukung kegiatan ekonomi BUMdes atau masyarakat
- c) Pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan
- d) Pengorganisasian bantuan hukum kepada masyarakat

- e) Penyelenggaraan promosi kesehatan
- f) Dukungan terhadap kegiatan desa
- g) Meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat

### **II.3 Kerangka Pikir**

Untuk melaksanakan kegiatan melalui tim Selanjutnya kerangka pemikiran penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

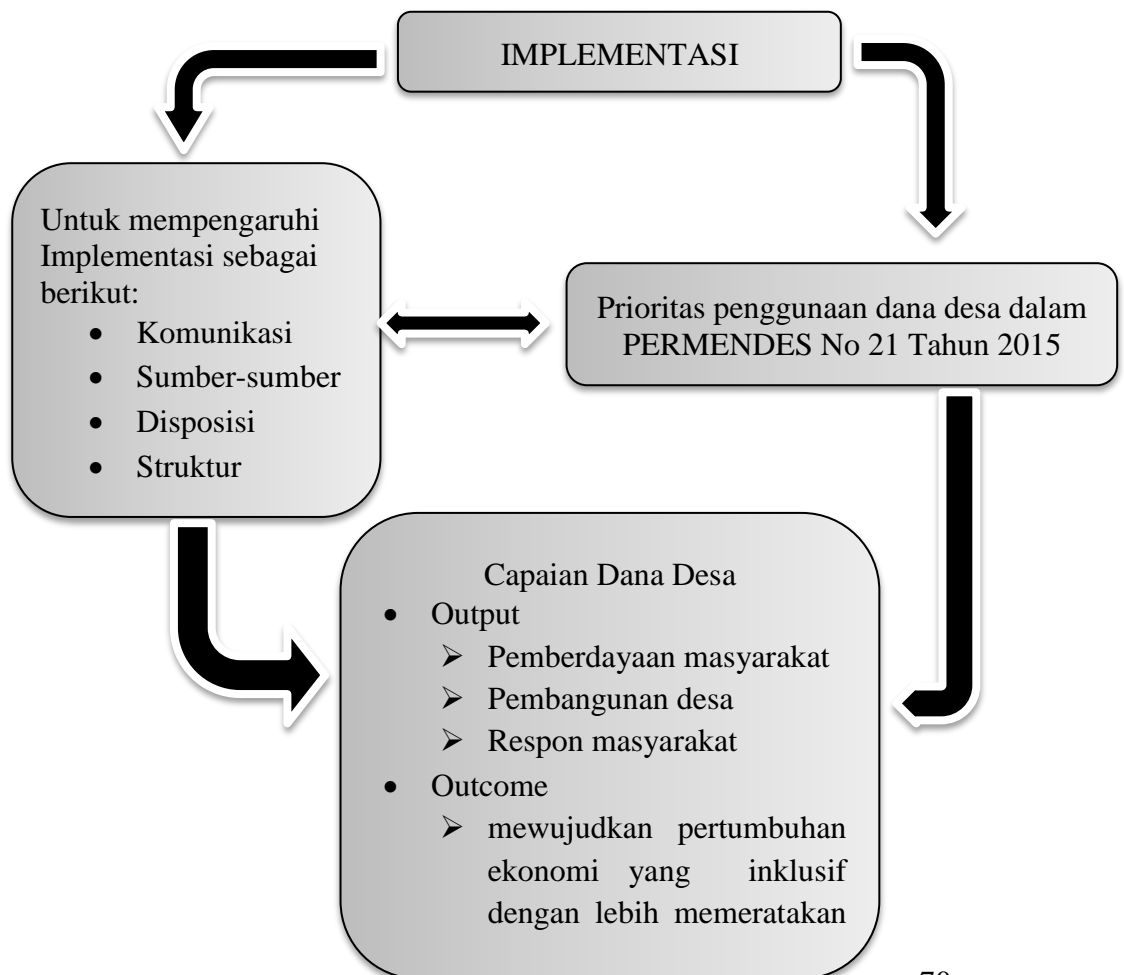
1. Dalam implementasi dana desa Komunikasi merupakan peranan penting yang sering digunakan dan sering disebut sebagai satu kemampuan yang sangat bertanggung jawab bagi keberhasilan seseorang, dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi (penerusan), konsistensi, dan kejelasan.
2. Sumber –sumber dapat merupakan faktor yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan maka implementasipun cenderung tidak efektif. Yang mempengaruhi sumber-sumber ialah sumberdaya manusia dan sumber dana.

3. disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif". Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif jujur adil dan tidak memihak. adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal
4. Berkaitan dengan penelitian ini, maka fenomena yang dipergunakan untuk mengukur struktur birokrasi adalah :  
Pembentukan Struktur Organisasi, Pembagian Tugas, Koordinasi dari para pelaksana kebijakan, Tanggung jawab implementasi, Mempunyai *Standart Operating Procedures* (SOP)
5. Untuk mengukur indikator teori implementasi maka penulis mengacu pada PERMENDES No 21 Tahun 2016 Tentang prioritas dana desa
6. Output dilihat dari capaian dana desa melalui prioritas dana desa (pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat

serta respon masyarakat setelah adanya implementasi dana desa)

7. Outcome di lihat dari pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemeratakan pendapatan dan meningkatkan sumberdaya manusia yang siap produktif serta pembangunan yang merata.

### Bagan 3. Kerangka Pemikiran



## II. 4. Definisi Konsepsional

Definisi ini merupakan penjelasan konsep (Variabel) dengan kata-kata atau istilah lain atau sinonimnya yang dianggap sudah dipahami oleh pembaca. (Masyhuri dan Zainuddin, 2008).

Definisi Konsepsional dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Implementasi adalah prinsip dari suatu kebijakan dalam pelaksanaan program melalui beberapa aktor sesuai tujuan dari kebijakan. Sedangkan dalam implementasi ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan meliputi; komunikasi yang baik; sumber daya manusia yang memadai, disposisi (sikap) yang baik dan struktur birokrasi yang mempunyai *Standart Operating Procedures* (SOP)
- 2) Pemerintah desa merupakan badan terendah pemerintahan pada tugas pekerjaan atau fungsi yang sejalan pada kehidupan masyarakat atau yang di perintah. Peran pemerintah desa yang di bentuk untuk menggerakkan masyarakat agar bisa menjadi kekuatan penting dalam pembangunan. Dengan adanya dana desa, kesempatan desa



untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sangat terbuka.

- 3) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayayai penyeenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

## **II.5. Definisi Operasional**

Definisi ini merupakan penjelasan tentang bagaimana operasi atau kegiatan yang harus dilakukan untuk memperoleh data atau indikator yang menunjukkan indikator yang dimaksud. Dengan kata lain bagaimana menemukan dan mengukur variabel-variabel dari masalah atau obyek yang akan diteliti dalam empirik (Masyhuri dan Zainuddin, 2008). Definisi Operasional dalam penelitian ini adalah :

**Tabel 2. Definisi Oprasional**

<b>Teori</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Indikator teori</b>	
<b>IMPLEMENTASI</b>	Komunikasi	Transmisi	Penyampaian hasil program kepada pemerintah dan kepada masyarakat
		Kejeasan	Tujuan implementasi
		Konsistensi	Keberlanjutan program
	Sumber-sumber	Sumber daya manusia	Kapasitas pemerintah desa dalam mengimplementasi dana desa
		Suber anggaran	Laporan anggaran dan program dana desa
		Sumber kewenangan	Kewenangan pemerintah desa dalam mengimplementasikan dana desa
	Disposisi	Rekrutmen	Proses seleksi pelaksana program
		Insentif	Anggaran oprasional
	Struktur Birokrasi	Sop	Presentase penggunaan program dana desa di lihat dari standar pemerintah
		Fragmentasi	Penyebar pertanggung jawaban sesuai bidang